

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN  
NEGERI MOJOKERTO DAN MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh:  
Lailatul Mufaidah  
16210038



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN  
NEGERI MOJOKERTO DAN MAQASHID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

Lailatul Mufaidah

16210038



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **SANKSI KEBIRI-KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO DAN MAQASHID SYARIAH**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar adanya. Jika di kemudian hari terdapat bukti bahwa tulisan ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Desember 2020  
Penulis,



Lailatul Mufaidah  
NIM. 16210038

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Mufaidah NIM:  
16210038 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik -Ibrahim Malang dengan judul:

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN NEGERI  
MOJOKERTO DAN MAQASHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Desember 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Lailatul Mufaidah, NIM 16210038, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO DAN MAQASHID SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 23 Juni 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196108012052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“WAHAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, JADILAH KAMU ORANG YANG BENAR-BENAR PENEGAK Keadilan, MENJADI SAKSI KARENA ALLAH BIARPUN TERHADAP DIRIMU SENDIRI ATAU IBU BAPA DAN KAUM KERABATMU. JIKA IA KAYA ATAUPUN MISKIN, MAKA ALLAH LEBIH TAHU KEMASLAHATANNYA. MAKA JANGANLAH KAMU MENGIKUTI HAWA NAFSU KARENA INGIN MENYIMPANG DARI KEBENARAN. DAN JIKA KAMU MEMUTAR BALIKKAN (KATA-KATA) ATAU ENGGAN MENJADI SAKSI, MAKA SESUNGGUHNYA ALLAH ADALAH MAHA MENGETAHUI SEGALA APA YANG KAMU KERJAKAN”  
(AN-NISA : 135)

## KATA-PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasaan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT PERSEPSI HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO DAN MAQASHID SYARIAH”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa -kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

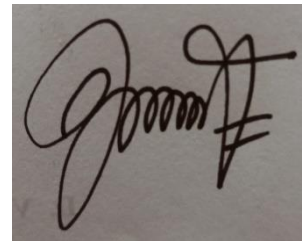
4. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, dan doa, dan segala pengorbanan baik materil maupun moril, seta senantiasa memberikan bimbingan dan segala bentuk perhatian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pihak Pengadilan Negeri Kota Mojokerto, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
9. Kepada Dzulkifli, Romli, Fanju, Venna dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri



Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Desember 2020  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lailatul Mufaidah', written in a cursive style.

Lailatul Mufaidah  
NIM. 16210038

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis bagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. -Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya	قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya	قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya	دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, -atau apabila -berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, -maka ditransliterasikan -dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	-
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Kebiri Kimia.....	16
2. Tugas Dan Kewenangan Hakim .....	18
3. Asas Legalitas .....	29
4. Asas Kepastian Hukum.....	31
5. Kekerasan Seksual Anak.....	33
6. Maqashid Syariah.....	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Mojokerto .....	46
1. Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto .....	46
2. Wilayah Hukum .....	46
3. Batas Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.....	47
4. Daftar Nama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto .....	47
5. gadilan Negeri Mojokerto .....	51
B. Hukuman Kebiri Kimia Menurut Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto	52
C. Kebiri Kimia Menurut Maqashid Syariah.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. KESIMPULAN .....	67
B. SARAN .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

## ABSTRAK

Lailatul Mufaidah, 16210038, **Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, SH, MH.

---

### **Kata Kunci : Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Maqashid Syariah**

Latar belakang dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai sanksi kebiri kimia sebagai pidana tambahan terhadap kejahatan seksual terhadap anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto yang sampai saat ini belum memiliki titik terang sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra yang menarik untuk dibahas dari segi hukum dan maqashid syariah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi maqashid syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, memakai pendekatan yuridis sosiologis, serta metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutuskan sanksi kebiri kimia berpedoman pada undang-undang. Menurut maqashid syariah, dikarenakan kejahatan seksual yang semakin meningkat dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat maka hakim diperbolehkan memutuskan sanksi berupa kebiri kimia karena merujuk pada kaidah *Addharuratu tubihu al mahdhurat* (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).



## ABSTRACT

Lailatul Mufaidah, 16210038, Chemical Castration Sanctions for Perpetrators of Sexual Violence Against Children According to the Perceptions of Judges at the Mojokerto District Court and Maqashid Syariah, Islamic Family Law Study Program, Thesis, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang , Advisor Iffaty Nasyi'ah, SH, MH.

---

Keywords: Chemical castration, sexual violence, maqashid sharia

The background that becomes the basis for this thesis research is due to problems in the application of the Mojokerto District Court's decision regarding the chemical castration crime, which until now has not had a bright spot. Besides that this is because of the law number 17 of 2016st has been passed regarding additional crimes against sexual offender against children which invite many interesting pros and cons to discuss in law and maqashid sharia.

The research focuses in this thesis are how is the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual offender against children according to the perceptions of the Mojokerto District Court judges and what is the chemical castration sanction for the sexual offenders against children according to the perception of Maqashid Syariah.

This research is an empirical legal research. Which uses a sociological juridical approach, and used metod in data collection are interviews and documentation.

The results showed that The judges at the Mojokerto District Court in deciding case is referred to what has been regulated in the law. According to maqashid sharia, due to increasing sexual crime and can endanger the safety of the community, judges are allowed to decide on a sanction in the form of chemical castration because it refers to *addharuratu tubihu al-mahdhurat* (a state pf urgency can allow punishment that is actually prohibited).

## مستخلص البحث

ليلة المفيدة، 16210038، عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي العنف الجنسي على الأطفال وفقًا لنظرية الحاكم في المحكمة الوطنية موجوكيرتوا والمقاصد الشريعة، بحث جامعي، قسم قانون الأسرة الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عفا تي الناشعة، الماجستير. الكلمات الرئيسية: الإخصاء الكيميائي، العنف الجنسي على الأطفال، المقاصد الشريعة.

تتعلق خلفية البحث في هذا البحث الجامعي عن عقوبة الإخصاء الكيميائي كعقوبة إضافية للجرائم الجنسية على الأطفال التي تقرها المحكمة الوطنية موجوكيرتوا والتي حتى الآن لم يكن لديها نقطة مضيئة بحيث تثير العديد من الإيجابيات والسلبيات المثيرة للاهتمام مناقشتها من وجهة نظر القانونية والمقاصد الشريعة. ركز البحث من هذا البحث الجامعي عن كيفية عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي العنف الجنسي على الأطفال وفقًا لنظرية الحاكم في المحكمة الوطنية موجوكيرتوا وكيفية عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي العنف الجنسي على الأطفال وفقًا لنظرية المقاصد الشريعة. كان النوع من هذا البحث هو بحث القانوني التجريبي الذي باستخدام منهجًا اجتماعيًا قانونيًا، وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق.

وأظهرت النتائج أن الحاكم أو القاضي في المحكمة الوطنية موجوكيرتوا في القرار عن عقوبة الإخصاء الكيميائي مسترشداً أو مستنيداً بالقانون. وفقًا للمقاصد الشريعة، نظرًا إلى تطوّر الجرائم الجنسية ويمكن أن تعرض سلامة المجتمع للخطر فلذلك يُسمَح للحكم باتخاذ القرار بشأن عقوبة الإخصاء الكيميائي لأنه يشير إلى قواعد "الضرورة تبيح المحظورات" (الاستعجال يمكن أن يسمح بالعقاب وهو محظور بالفعل).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebiri adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan dorongan seksual / libido pada laki-laki baik dengan operasi medis (pembedahan) maupun dengan suntikan kimiawi. Untuk operasi medis (pembedahan) yakni dengan operasi pengangkatan testis sebagai tempat produksi hormon testosteron.

Dewasa ini, seiring berkembangnya teknologi maka ditemukanlah metode kebiri tanpa harus melakukan pemotongan terhadap alat vital pelaku, yang disebut dengan kebiri kimia. Kebiri kimia sendiri adalah suatu metode dimana zat anti androgen dimasukkan kedalam tubuh dengan tujuan untuk mengurangi hormon testosteron baik berupa kapsul, pil, atau suntikan yang mana dapat menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat untuk berhubungan seksual.<sup>1</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak semakin tahun semakin mengalami kenaikan. Data yang didapat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat bahwasanya pada tahun 2016 kasus tersebut mengalami kenaikan. “Kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan pada tahun 2015

---

<sup>1</sup> Pujiono, “*Apa dan Bagaimana Kebiri Kimia bagi Paedofil*” <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi> diakses pada 15 Juli 2020

sebanyak 1975 kasus dan meningkat menjadi 6820 kasus pada 2016.” Kata presiden dalam rapat mengenai penanganan kasus kekerasan seksual di Jakarta.

Angka diatas sebesar didominasi oleh pria sedang wanita kasusnya dibawah pria, dengan rentan umur 13-17 tahun telah mengalami kekerasan fisik. Sementara untuk kekerasan emosional sendiri telah menyentuh angka 96,22% perempuan dan 86,65% anak-anak mengalaminya menurut Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dalam 2019 mencatat bahwa terdapat sekitar 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak.<sup>2</sup>

Karena itu, “kejahatan tersebut tergolong kategori kejahatan luar biasa” ujar Jokowi pada 25-04-2016. Kemudian Presiden membuat kebijakan untuk merubah UU Nomor 23 tahun 2003 yang menjelaskan tentang perlindungan anak.<sup>3</sup>

Kian hari kasus yang terjadi pada negeri ini tak kunjung mereda. “Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kasus kekerasan seksual menempati posisi teratas yang diikuti dengan kekerasan psikis maupun kekerasan fisik.” Ucap Joko Widodo selaku presiden pada rapat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak” 9 Januari 2020.<sup>4</sup>

Pada awal 2020 terjadi beberapa kasus kekerasan tersebut. Diantaranya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada 12 pelajar

---

<sup>2</sup> <https://setneg.go.id> diakses pada 24 November 2020

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Ancaman Over Kriminalisasi dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 15

<sup>4</sup> <https://setneg.go.id> diakses pada 24 November 2020

perempuan sekolah dasar yang bertempat di kecamatan Seyegan, Sleman, Yogyakarta (DIY) oleh guru mereka yang berusia 48 tahun. Kasus tersebut terungkap pada Januari 2020, namun berdasarkan keterangan tersangka hal itu mulai ia lakukan sejak tahun 2019.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Komisi Perlindungan Anak pada bulan januari-oktober 2019 kekerasan seksual pada dengan sasaran anak sekolah kian meningkat. Dari data KPAI setidaknya ada 17 kasus dalam lingkup sekolah dengan korban sebanyak 89 orang, dengan 55 wanita dan 34 pria.

“Pengaduan yang kami terima mengenai kasus ini sebenarnya mengalami penurunan, namun level kekerasan yang dialami korban justru sangat meningkat. Dan yang agak mengerikan adalah kekerasan seksual yang mengalami peningkatan,” ujar Retno selaku Komisioner Bidang Pendidikan KPAI 9 Desember 2019.

Dalam 17 kasus diatas 88% dilakukan oleh tenaga pendidik sedang 22% dilakukan oleh kepala sekolah. Terdapat 11 kasus yang terjadi di tingkat Sekolah Dasar, 4 kasus terjadi di SMP dan 2 lainnya terjadi di SMA. Kasus diatas terjadi akibat korban belum memahami aktivitas seksual. Kemudian lahir PERPU sebagai pengganti UU No.1 tahun 2016, dimana disebutkan bahwa pelaku kejahatan tersebut akan diberi sanksi dengan cara dikebiri.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.jawapos.com/opini/31/08/2019/problem-fikih-kebiri-kimia/> Diakses pada Selasa, 08 Oktober 2019

Salah satu kasus kekerasan seksual yang sedang marak diperbincangkan adalah pedofilia. Yakni kasus Aris (20 Tahun) asal Mojokerto yang telah melakukan tindakan pedofilia terhadap 11 anak.<sup>6</sup> Aris diketahui telah ditangkap polisi pada Oktober 2018 setelah dilaporkan oleh pihak orang tua korban yang diketahui masih duduk di bangku TK. Ketika ditanya mengapa melakukan hal tersebut oleh polisi Aris mengaku kalau dia terpengaruh film dewasa. Perbuatannya tersebut membuat dia harus dihukum selama 12 tahun, juga tambahan hukuman kebiri kimia.

Ketika terbit keputusan dari PT Surabaya No. 695/PID.SUS/2019/PTSBY yang menguatkan putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk yang diputus pada 2 Mei 2019 yang memvonis M. Aris bin syukur bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, publik dikejutkan oleh sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak sebagai eksekutor kebiri yang merupakan vonis tambahan pada M Aris selaku terpidana 12 tahun penjara karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur.

Daeng M. Faqih selaku wakil ketua IDI (ikatan dokter Indonesia) “bahwa kebiri kimia dilakukan dalam perpektif hukuman, juga seorang dokter

---

<sup>6</sup> [www.mtribunnes.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto](http://www.mtribunnes.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto) diakses pada 30 Agustus 2020

tidak diperbolehkan mengubah bentuk tubuh seseorang dari normal menjadi abnormal”.<sup>7</sup>

Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjadi Pengadilan Negeri pertama yang menerapkan hukuman tambahan kebiri kimia tersebut, menyatakan bahwa kasus Aris terdaftar dalam Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor kasus 79 Pidsus Tahun 2019 Nomor 65 dan 69 dengan pidana dikebiri kimia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Siti N. Laila menyatakan bahwa “kebiri tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak perlindungan juga integritas fisik seseorang”.

Sedangkan menurut Komisi Perlindungan Anak, hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan atau pemberatan terhadap pelaku kejahatan tersebut dapat mengurangi kasus yang terjadi terhadap anak dan diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal yang dianggap paling kontroversial pada ketentuan pasal yang diubah, yaitu pada pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual sebagaimana pada (4) dan (5) dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016 yang telah disahkan oleh presiden.

---

<sup>7</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.dilakukan.dalam.perspektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> diakses pada tanggal 09 September 2020

Islam tidak pernah menyiratkan hukum kebiri, dalam islam sendiri kesalahan yang dilakukan sudah jelas tertera hukumnya dalam al-quran.<sup>8</sup>

Ditetapkannya kebiri kimia sebagai hukuman tambahan diharapkan dapat memberi efek jera. “Selain sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual berulang (*residive*) pidana tambahan kebiri juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual luar biasa”. Jika dikaitkan dengan Maqashid Syariah, kebiri kimia menarik untuk dibahas dengan sudut pandang kemaslahatan baik bagi pelaku, korban, ataupun masyarakat.

Dengan problematika diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti. Maka penulis ingin meneliti mengenai bagaimanakah sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto?
2. Bagaimana sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi Maqashid Syariah?

---

<sup>8</sup> <http://www.muslimdaily.net/artikel/Islam-tak-pernah-syariatkan-kebiri-bagi-pedofil.html>, diakses pada 20 Desember 2016 pukul 10.25



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto.
2. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi Maqashid Syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman khususnya bagi penulis kepada civitas akademika mengenai sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman terkait dengan penelitian yang ditulis, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan penelitian ini, yang mana sebagai berikut:

Bab I, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang, penulis memaparkan alasan mengapa memilih judul “Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah”. Kemudian dengan latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah berupa pertanyaan terkait dengan judul penelitian yang kemudian dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai jawaban rumusan masalah. Selanjutnya pada manfaat penelitian dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis untuk mengetahui pengaruh penelitian ini untuk masyarakat dan akademis. Sistematika penulisan pada bab ini menguraikan mengenai pemaparan yang dimulai dari pendahuluan sampai kesimpulan yang akan dibuat.

Bab II, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Adapun penelitian terdahulu berisi informasi mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kebiru kimia, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun hasil skripsi yang telah diterbitkan, baik

secara substansi maupun metode yang digunakan, dalam penelitian ini terdapat keterkaitan dengan permasalahan peneliti sebelumnya untuk menghindari kesamaan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keaslian penelitian ini serta perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, untuk mempermudah menganalisa persamaan maupun perbedaan tersebut maka dilengkapi dengan sebuah tabel. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori digunakan untuk menganalisis hasil setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi kebiri kimia baik menurut persepsi hakim pengadilan yang memutus perkara maupun menurut maqashid syariah.

Bab III, berisi mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdiri dari: 1) Jenis Penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi; 2) Pendekatan Penelitian. Disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskna pentingnya menggunakan pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian yang sesuai dengan judul, dipendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan data yang berbentuk deskriptif; 3) Lokasi Penelitian. Untuk menjelaskan dimana peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Mojokerto; 4) Sumber Data. Yang digunakan untuk menjelaskan jens data yang dipakai yaitu data

primer yang didapat dengan hasil wawancara responden yakni hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Sedangkan data sekunder didapat dari buku atau literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan website yang berkaitan dengan sanksi kebiri kimia; 5) Metode Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data, urutan kerja, serta cara pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian; 6) Metode Pengolahan Data. Untuk menjelaskan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh sehingga jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi mengenai uraian hasil dari penelitian dan analisis data baik secara primer maupun sekunder. Apabila terdapat perbedaan antara teori data analisis maka merupakan sesuatu yang baru, jika terdapat kesamaan maka itu akan menjadi penguat. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai profil lokasi penelitian serta data yang berkaitan dengan penelitian.

Bab V, Penutup. Pada bab terakhir dalam penelitian ini berupa kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara singkat terhadap rumusan masalah dan diakhiri dengan saran-saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang diteliti penulis berjudul “Hukuman Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah”. Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang meneliti tentang kebir kimia dan kemungkinan adanya perbedaan objek serta lokasi penelitian, maka dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak terdapat unsur duplikasi dari penelitian yang lainnya. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut.

##### **1. Sanksi kebir di Indonesia dalam pandangan hukum islam dan perlindungan anak**

Penelitian ini ditulis oleh Madnur, Mahasiswa Program Studi S-2 hukum keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subyek menggunakan buku seperti hukum islam, kitab fikih, tidak adanya dalil dalam kitab umat islam tentang penjelasan kebir tersebut baki pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sedang kebir kimia dijadikan alternatif

pada pelaku kejahatan agar mendapat rasa jera.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai kebiri kimia. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian ini adalah penelitian normative dan membahas kebiri kimia dalam pandangan hukum islam dan Undang-undang Perlindungan anak. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas mengenai pandangan hakim pengadilan negeri Kota Mojokerto dan Maqashid Syariah mengenai kebiri kimia.

## **2. Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)**

Penelitian ini ditulis oleh Ari Prasetyo Handoko, mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2019. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa vonis kebiri ini dianggap selaras dengan konsep teori gabungan dengan cara menyeimbangkan pemidanaan dengan hak korban juga memberi edukasi

---

<sup>9</sup> Madnur, *“Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak”*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019)

kepada masyarakat.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas masalah kebiri kimia, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan. Penelitian penulis fokus pada pandangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah mengenai hukuman pidana kebiri kimia.

### **3. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Penelitian ini ditulis oleh Hadyan Harits, mahasiswa Jurusan Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pedofilia ini dikenakan hukumna tazir, yaitu jenis hukuman yang belum terdapat ketentuan baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Pandangan hukum islam terhadap hukuman kebiri kimia tidak dianjurkan dalam hukum pidana Islam dan jika dilaksanakan maka bertentangan dengan kaidah fiqh dan norma-norma yang ada.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah karena sama-sama membahas mengenai kebiri kimia.

---

<sup>10</sup> Ary Prasetyo Handoko, *“Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Omor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 2019)

<sup>11</sup> Hadyan Harits, *“Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016)

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana kebiri kimia jika dilihat dari Hukum Pidana Islam, penelitian penulis adalah fokus pada bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah mengenai hukuman kebiri kimia.



**Tabel 1: Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1	Madnur, 2019, Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Sanksi Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang kebir kimia.	penelitian normative dan membahas kebir kimia dalam pandangan hukum islam dan Undang undang Perlindungan anak. kebir kimia.	Penelitian penulis adalah membahas mengenai pandangan hakim pengadilan negeri Kota Mojokerto dan Maqashid Syariah.
2	Ari Prasetyo Handoko, 2019, mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta	Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23	Penelitian ini sama-sama membahas tentang kebir kimia.	Penelitian ini fokus membahas mengenai kebir kimia ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan	Penelitian penulis fokus pada pandangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah mengenai hukuman pidana kebir kimia.

		Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)			
3	Hadyan Harits, mahasiswa Jurusan Pidana Islam Fakultas Syariah dan -Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016.	Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	Penelitian ini sama-sama membahas tentang kebiri kimia.	penelitian ini berfokus pada abagaimana kebiri kimia jika dilihat dari Hukum Pidana Islam,	penelitian penulis adalah fokus pada bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dan Maqashid Syariah mengenai hukuman kebiri kimia.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Kebiri Kimia

Kebiri adalah tindakan yang dilakukan dengan cara bedah dan bahan kimia guna mengurangi kerja testis dan ovarium, dilakukan dengan beberapa pengebirian, yaitu :

#### a. *Surigical castration* (Pengebirian Bedah)

Proses ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi gairah seksual. Pengebirian bedah sangat efektif bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pengebirian bedah memiliki

efek samping seperti kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormon testosteron dan mengalami infeksi jangka panjang.

b. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

Pengebirian Kimia ialah pemberian cairan anti testostosterone kepada tubuh laki-laki untuk mengurangi hormon testosteron. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosteron dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya, dengan adanya faktor piskis dapat menimbulkan kembali gairah seksual terhadap orang yang sudah dikebiri kimia.

Jika ditinjau dalam medis, pemberlakuan hukuman kebiri kimia dapat menimbulkan dampak negatif. Disebutkan bahwasanya: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin" kata Wimpie. Namun, kebiri kimia dapat memunculkan dampak negatif berupa penuaan dini pada tubuh pelaku.

Cairan anti androgen dikabarkan dapat mengurangi kepadatan tulang, sehingga kemungkinan terjadinya pengeroposan tulang

semakin bertambah. Anti androgen juga dikabarkan dapat mengurangi massa otot sehingga memperbesar potensi obesitas.

Pengebirian ini memperbesar kemungkinan sang pelaku menjadi lebih agresif disebabkan psikis dia dan sosial dia, termasuk rasa sakit hatinya.

Jika ditinjau dari pandangan medis sendiri, kebiri akan memberi efek negative terhadap sang pelaku, dikutip dari national geographic: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, pengkebirian ini menimbulkan efek negative bagi tubuh, seperti mempercepat terjadi pengkeroposan tulang. Juga memperlemah massa otot, dan memperbesar resiko penyakit jantung juga pembuluh darah.

## **2. Tugas dan Kewenangan Hakim**

### **a. Pengertian Hakim**

Dalam Pasal 1 ayat 8 KUHAP disebutkan bahwa : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Juga diatur dalam pasal 1 (5) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan ini adalah kemerdekaan melakukan putusan untuk menegakkan hukum dengan syarat yang telah diatur oleh undang-undang.

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hakim telah dinaungi oleh undang-undang. Ciri negara yang menganut hukum yakni terdapat kebebasan dan hakim tidak diperbolehkan memihak dan tidak dapat dipengaruhi kekuasaan. Kebebasan itu berbanding terbalik, karena hakim tidak dapat melakukan putusan dengan kemaunnya sendiri, karena sudah terdapat peraturan hukum yang berlaku.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Bahwa :<sup>12</sup> “Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”

Dalam sidang yang berlangsung hakim harus aktif bertanya juga memberi kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk bertanya kepada para saksi yang ada. Cara tersebut diharapkan dapat mengungkap kebenaran materil, juga hakim yang akan bertanggung jawab dengan segala putusannya.

Kebebasan hakim juga harus disagkutkan dengan masalah yang dihadapinya, agar sang hakim dapat memberi putusan sesuai dengan perkara yang ia tangani. Kebebasan hakim adalah cara dimana seorang hakim akan menentukan hukuman yang sesuai (bukan membuat hukum). Hakim juga dapat berdiskusi dengan pendapat ahli hukum.

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 26-27

Muchsin menyatakan bahwa:<sup>13</sup> “Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.” Andi Hamzah :<sup>14</sup> “Dalam hal ini hakim dianggap tidak memihak jika tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHP”.

Dalam memberi putusan hakim dituntut berlaku adil dan mempertimbangkan norma sosial yang ada di masyarakat. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

---

<sup>13</sup> Muchsin *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), 20

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 91

berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Undang-undang diatas menyebutkan bahwa hakim dapat melakukan tindakan:

- 1) Kasus yang sudah tertera dalam undang-undang, dengan hukum yang sudah ditetapkan maka hakim tinggal melakukan putusan.
- 2) Kasus yang belum jelas hukumannya. Maka hakim akan melakukan tafsir hukum dari undang-undang, dengan penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
- 3) Kasus yang tidak diatur undang-undang. Dilakukan dengan cara, hakim akan menggali nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

Pada dasarnya hakim harus memberi putusan dengan adil dan dengan segala resiko yang ia peroleh. Putusan diambil secara adil dan objektif jugadiberlakukan saat sidang terbuka, kecuali Undang-undang yang mengatur mengatakan lain, hakim diwajibkan membuat banyak pertimbangan dalam melakukan putusan.

Pada pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 menjelaskan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pendapat Roeslan Shaleh : “menggali dan menemukan nilai hukum yang sesuai dengan pancasila dan *According to the law of civilizied nations*”.



Jika hakim memberi putusan menurut undang-undang, hakim tidak perlu mencari norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Jika hukum yang diatur dalam undang-undang kurang begitu jelas, maka sang hakim wajib menggali informasi dari norma masyarakat yang berlaku.

- c. Peran putusan hukum dan penemuan hukum oleh hakim dalam pengadilan.

Jika dalam putusannya hakim menemukan bahwa norma hukum yang ada dalam masyarakat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka sang hakim tidak wajib mengikuti norma tersebut. selaras dengan UUD 1945 amandemen I-IV.

Ahmad rifai berpendapat bahwa: “Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk *yurispundensi* yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum).

Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat

diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.”

Dengan demikian wewenang yang diemban hakim menjadi berat dikarenakan harus menemukan isi pokok, hukum, serta rasa adil bagi masyarakat. Pada dasarnya saat hakim melakukan sebuah putusan sering terjadi berbagai kendala, dalam hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak melulu dapat menyelesaikan permasalahan. Tak jarang hakim harus melakukan putusannya sendiri bahkan menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang sudah tertera sebelumnya, hakim dituntut untuk memiliki inisiatif tinggi dalam melakukan putusannya, sebab hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau hukum yang tertera belum jelas.

Untuk itu, hakim harus memiliki ilmu-ilmu kehakiman agar dapat memberikan putusan terbaik dan juga menjadi referensi hukum baru.

Wildan Suyuti.M berpendapat bahwa: “Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Dia dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Dia harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.”

Dalam pemeriksaan serta memberi putusan seringkali hakim menghadapi masalah bahwa hukum yang ada tidak dapat menjawab secara benar untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian sang hakim dituntut menemukan hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa: “Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnyanya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.”

Karenanya hakim dituntut untuk meberlakukan hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang mencakup dua aspek : pertama hakim dituntut untuk menggunakan hukum tertulis yang ada, jika ada yang tidak tercakup oleh peraturan tersebut barulah hakim boleh menemukan sendiri hukum dari sumber hukum yang valid.

Dalam negara ini sendiri hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum dan membentuk hukum tidak hanya sekedar wadah undang-undang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dalam melakukan sebuah putusan hakim berhak mengadili, dan mengikuti nilai sosial yang ada dalam masyarakat. “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan yang ada, maka hakim berhak untuk menemukan hukum, agar dapat memberi putusan yang sesuai dan dengan rasa adil bagi masyarakat. Ketentuan tersebut berlaku pada hakim dalam lingkup pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun hakim agung.

Hal yang menarik adalah : “Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban mengadili, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Disebut memiliki daya tarik karena yang diembannya yang dapat menemukan hukum, bahkan melakukan terobosan hukum. Dalam rangka memberi rasa keadilan bagi warga.

Hakim Mahkamah Agung sebagai orang yang bertindak dalam penetapan kasasi tidak berhak untuk ikut memeriksa perkara, namun mereka hanya dapat memeriksa penerapan hukum dari sebuah perkara yang diajukan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan: “Pada dasarnya hakim memang harus menegakkan hukum yang ada dalam peraturan

perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas memang lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Disisi yang lain dalam kehidupan modern dan kompleks serta dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera.”

Dalam undang-undang disebutkan bahwa hakim berhak untuk menggali nilai nilai dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar dapat memutus berdasarkan keyakinan mereka. Meskipun begitu, hakim tidak diperbolehkan memutus perkara dengan semena mena tanpa memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dalam Amandemen I sampai IV terdapat prinsip-prinsip peradilan yang dapat melakukan upaya dalam menemukan dan menemukan hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat digolongkan menjadi beberapa prinsip, antara lain :

- 1) Putusan pengadilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini diambil

dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi lima dasar negara yang disebut Pancasila. Prinsip ini merupakan landasan filosofis hakim dalam mengadili dan memeriksa sebuah perkara.

- 2) Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas atau prinsip ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam penjelasannya dinyatakan sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen 1 sampai 4. Dalam prakteknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (*irah-irah*) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.
- 3) Prinsip Kemandirian Hakim.
  - a) Hal ini seperti yang terdapat dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 jo. Pasal 1 dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Yang bebas dari campur tangan pihak diluar kehakiman.
  - b) Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 48 tahun 2009, menegaskan hakim harus bersikap mandiri.

4) Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara.

Dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang telah diajukan.

5) Hakim harus memahami tentang nilai nilai baik dalam hukum maupun dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan hakim dapat memutuskan sebuah perkara dengan didasarkan atas rasa keadilan kepada masyarakat dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai hukum yang ada.

### **3. Asas Legalitas Hukum**

Asas legalitas adalah suatu asas yang memberi batas jelas antara perbuatan yang dilarang dan tidak. jadi memberikan ruang gerak kepada individu dari penyalahgunaan hukum oleh oknum tertentu. Karena dalam asas ini disebutkan secara jelas antara perbuatan yang dilarang maupun tidak, karena berdasarkan asas ini, tidak ada satu pun perbuatan yang boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan tersebut belum dilakukan.<sup>15</sup>

Maka, perbuatan seseorang tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum jikalau belum ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Dan hal itu menjadi hak

---

<sup>15</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asas\\_legalitas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas) diakses pada 17 Februari 2021

individu untuk melakukan ataupun tidak melakukannya sampai ada peraturan yang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. dan hakim hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman karena hukum pidana pada dasarnya tidak berlaku ke belakang, tetapi berlaku ke depan semenjak disahkannya peraturan tersebut.

Asas legalitas berlaku pada hukum pidana. Von Feurbach dalam pepatahnya mengatakan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti: “tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman, tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”. Secara umum, Von Feurbach membagi petatahnya menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Tidak ada hukuman tanpa ketentuan Undang-undang (*Nulla Poena sine lege*)
- b. Tidak ada hukuman tanpa perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*)
- c. Tidak ada perbuatan pidana tanpa hukuman yang berdasarkan Undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).

Pepatah tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-retroaktif) karena suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang perbuatan tersebut dilakukan, bukan setelah perbuatan tersebut dilakukan.



Asas Legalitas memiliki 4 makna yang dikemukakan oleh Jeschek dan Weigend antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentuan pidana tidak berlaku surut
- b. Ketentuan pidana harus tertulis, tidak didasarkan pada kebiasaan
- c. Rumusan ketentuan pidana harus jelas
- d. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi.

Berdasarkan makna yang disebutkan diatas mengenai asas legalitas, menjadi dasar perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak.

#### **4. Asas Kepastian Hukum**

Dalam pembentukan aturan hukum, terdapat asas yang dibuat demi terciptanya kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut disebut dengan asas kepastian hukum. Makna dari asas kepastian hukum adalah asas yang berlaku dalam negara hukum yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kebijakan yang diberlakukan dalam negara tersebut. Asas ini menghormati hak-hak individu dan memberikan batasan terhadap oknum oknum yang memberlakukan peraturan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pejabat negara.

Contohnya seperti:

- a. Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai maka dapat dikatakan pemerasan.
- b. Pembelanjaan uang negara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat dikatakan korupsi. Begitupun sebaliknya, jikalau pembelanjaan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak dapat dikatakan korupsi.

Adanya asas kepastian hukum sejatinya adalah keadaan dimana telah kepastian hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Lord Lloyd “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainly, or without that it would be impossible to assert that was operating in a given territory amounted to a legal system*” yang mana hal ini berarti tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu tentang apa yang dilakukannya sampai akhirnya timbullah ketidakpastian hukum yang mengarah kepada kekerasan dan ketidaktegasan dalam sistem hukum. Sehingga dengan adanya kepastian hukum maka dapat terbentuk hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005*

## 5. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terjadi karena tidak berlakunya suatu norma dalam jiwa seseorang yang mengakibatkan dilanggarnya kepentingan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Seiring bejkembannya zaman, kekerasan seksual semakin marak terjadi, diantaranya seperti percobaan pemerkosaan, perbudakan seksual dan lain sebagainya yang merujuk pada kekerasan seksual.<sup>17</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak diartikan sebagai tindak pemaksaan untuk melakukan sebuah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak anak. Korbannya pun beragam. Bisa dari anak perempuan dan laki-laki, namun lebih banyak korban perempuan dengan kisaran umur 18 tahun.<sup>18</sup>

### a. Pengertian Perkosaan

Tindak seperti ini merupakan sebuah kejahatan seksual. Terjadi karena melakukan paksaan terhadap orang lain untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.<sup>19</sup>

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>20</sup> Tindakan ini

---

*Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2016) Vol 13, No 2, 204

<sup>17</sup><http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada 10 September 2020

<sup>18</sup> Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2000), 14

<sup>19</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Gitamedia Press), 453

diatur dalam KUHP pasal 28 dengan bunyi: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”*.<sup>21</sup>

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Sebuah hubungan layaknya pasangan suami istri tanpa persetujuan dari wanitanya.
- 2) Perbuatan yang dilakukan dengan cara memaksa dan berbanding terbalik dengan kemauan wanitanya.
- 3) Perbuatan atau hubungan layaknya suami istri yang dilakukan kepada wanita (bukan istrinya) juga dilakukan dalam keadaan ketika wanita tersebut merasa terancam.

b. Macam-macam tindak perkosaan

Dikelompokkan berdasarkan motif pelaku untuk melakukan tindak perosaan adalah sebagai berikut :

1) Seductive Rape

Perkosaan jenis ini lebih cenderung antara pelaku dan korbannya sudah saling mengenal dengan baik. Seperti antar sepasang kekasih, yang mana pada pelaku timbul nafsu birahi terhadap pasangannya.

2) Sadistic Rape

Pemeriksaan yang dilakukan dengan sadis. Dalam kasus ini motivasi pelaku dalam melakukan kejahatan seksual bukan didasari atas nafsu belaka, namun tujuan utama pelaku adalah menyiksa korbannya.

---

<sup>20</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), 97

<sup>21</sup> KUHP Pasal 285

### 3) Anger Rape

Dalam kasus ini, motivasi pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap korbannya adalah untuk melampiaskan rasa marahnya terhadap si korban. Kekerasan ini biasanya dilakukan secara brutal secara fisik, karena kepuasannya terletak bukan dari hubungan badannya, melainkan dari kekerasan yang telah ia lakukan.

### 4) Domination Rape

Dalam kasus pemerkosaan ini, motivasi pelaku adalah untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa atas korbannya. Ia ingin menunjukkannya dengan cara melakukan kekerasan seksual terhadap korbannya. Contohnya seperti majikan terhadap pembantunya, kakak terhadap adiknya, ayah tiri terhadap anak tirinya, bos terhadap karyawannya dan lain sebagainya.

### 5) Exploitation Rape

Dalam kasus pemerkosaan ini, eksploitasi terhadap korban adalah tujuan utama si pelaku karena didukung dengan faktor-faktor yang menyebabkan korban bergantung terhadap pelaku. misalnya dalam hal ekonomi, sosial, atau yang lainnya. Jika si pelaku menghendaki, ia dapat melakukannya dengan disertai kekerasan, karena si korban pun tidak akan bisa melakukan perlawanan.<sup>22</sup>

Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu<sup>23</sup>:

#### 1) Faktor internal:

##### a) Lingkup keluarga

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: In Hill, 1997), 92-93.

<sup>23</sup> Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), 54.

- b) Ekonomi keluarga
  - c) Pendidikan
  - d) Agama/moral.
- 2) Faktor eksternal:
- a) Lingkup sosial
  - b) Perkembangan teknologi
  - c) Adanya kesempatan
- c. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Merupakan tindak pidana yang *kasuities* dalam artian tindak pidana yang hanya dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti, dengan hal itu pihak korban sering mengalami kesulitan. Seperti tidak adanya saksi. Juga seringnya pelaku tidak mengakui perbuatannya, dengan alasan melakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga berdampak pada sulitnya hakim untuk memberi putusan.

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang dijelaskan dalam pasal 285 KUHP:

- 1) Unsur barang siapa.
- 2) Unsur ancaman dan kekerasan yang dilakukan kepada wanita yang bukan istrinya.

Yang dikatakan unsur pemaksaan dan ancaman adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengandalkan tenaga badan dan dapat membuat seseorang mengalami hilang kesadaran atau tidak berdaya. Hal tersebut diatur dalam pasal 184KUHP :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Alat bukti surat
- 4) Alat bukti petunjuk

5) Keterangan terdakwa.

## 6. Maqashid Syariah

Secara bahasa *Maqashid Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* sendiri adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa *المواضع تحدر الي الماء* yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Fathi al-Daraini menjelaskan bahwa hukum yang dibuat bukan untu hukum itu sendiri, melainkan untuk kemaslahatan. Begitu juga Abu Zahra pun menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam dibuat adalah untuk kemaslahatan umat.<sup>25</sup>

*Maqashid as-syari'ah* secara umum berarti dibuatnya syariat-syariat yang belum ada oleh *syari'* (pembuat hukum). Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut *ijtihad*. Secara umum *ijtihad* adalah suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya

---

<sup>24</sup> Fathur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1984), 140

<sup>25</sup> Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-usuliyyaah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damasyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28.

(Al-qur'an dan Hadis) untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

a. Pembagian Maqashid al-Syari'ah

*Maqashid al—syari'ah* mengandung empat aspek di dalamnya, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan utama dari syari'ah sendiri adalah kemaslahatan manusia dunia akhirat
- 2) Syari'ah menjadi suatu hal yang harus dimengerti
- 3) Syari'ah menjadi hukum taklif yang wajib dilakukan
- 4) Tujuan syari'ah yakni membawa seseorang kedalam naungan hukum.

Terkait keempat pokok diatas, saling berkesinambungan satu dengan lainnya. Untuk aspek pertama syariah dibuat untuk kemaslahatan manusia. Aspek kedua yakni perihal makna yang dikandung didalamnya, sehingga tujuan dibuatnya dapat dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, mengenai pelaksanaan syariah itu sendiri, aspek terakhir adalah mengenai keikhlasan manusia dalam menjalankan syariah dalam kehidupannya.

Dalam maqashid syariah, yang terpenting dan menjadi inti adalah tujuan awal dibentuknya, yang terpenting adalah mengandung unsur kemaslahatan bagi masyarakat. Jika unsur pertama sudah tercapai maka



akan dapat mewujudkan unsur-unsur pokok di dalamnya. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, maka Imam Ghazali memabginya menjadi tiga tingkatan yaitu<sup>26</sup> :

- 1) Maqashid al-daruriyat
- 2) Maqashid al-hajiyyat
- 3) Maqashid al-Tahsiniyat

Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok (Maqashid al-daruriyat) yang mencakup lima hal penting. Antara lain sebagai berikut :

- a) *Hifdz ad-din* memiliki makna memelihara agama. Maksudnya adalah bahwasanya memelihara diri dari hal-hal yang bertentangan dengan agama serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama. Serta menciptakan toleransi antar umat beragama tanpa menjudge satu dengan lainnya.
- b) *Hifdz an-nafs* memiliki makna menjaga diri dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa. Menciptakan kehidupan yang baik bagi diri sendiri.
- c) *Hifdz al-aql* memiliki makna menjaga akal dari kebodohan. Memberikan asupan intelektual sebagai jalan untuk menyejahterakan diri dan juga masyarakat. Serta menjauhi hal-hal

---

<sup>26</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad), h. 8

yang dapat membuat diri melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti mabuk dan sebagainya.

- d) *Hifdz al-mal* bermakna bahwa seseorang memiliki hak untuk bekerja, untuk menjaga diri dari meminta-minta. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, dan berhak untuk menciptakan pekerjaan agar dapat membantu orang disekitarnya untuk memperoleh pekerjaan.
- e) *Hifdz al-ird* memiliki makna memelihara kehormatan. Baik kehormatan diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang, kehormatan keluarga, kehormatan orang disekitar dan kehormatan masyarakat.

*Kedua*, pemenuhan kebutuhan sekunder (Maqashid al-hajiyaat) manusia. Seperti kebutuhan ekonomi, hubungan sosial antar manusia, hubungan politik, dan hal-hal yang lebih mengarah kepada hubungan antara manusia dengan manusia.

*Ketiga*, pemenuhan kebutuhan tersier (Maqashid tahsiniyaat) yakni kebutuhan untuk memperindah diri agar dianggap baik oleh manusia lainnya. Agar dipandang lebih, yang mana kebutuhan ini lebih mengarah pada penampilan dan gaya hidup manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) yang ditunjang dengan data-data kepustakaan seperti dokumen, jurnal, dan buku.<sup>27</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yakni mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.<sup>28</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto, yaitu di Jalan R.A Basuni No. 11, Mergelo, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur 61361.

#### **D. Sumber Data**

Data merupakan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Untuk menjawab hal-hal yang diteliti dibutuhkan data. Nah berikut sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi 2, antara lain :

1. Sumber data primer

---

<sup>27</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21

<sup>28</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada 11 September 2020

Bahan data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber utama<sup>29</sup>. Data primer diperoleh dari hasil interview atau wawancara secara langsung dengan subjek penelitian atau informan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Mojokerto yang mengadili perkara Nomor 69/Pid.Sus/PN.Mjk/2019.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh pihak lain. baik itu berupa dokumen, jurnal, buku, laporan, artikel, dan data-data yang berhubungan dengan kebiri kimia.

## E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dianggap metode yang paling efektif dalam penelitian lapangan dikarenakan dengan wawancara peneliti dapat berhadapan langsung dengan responden untuk memperoleh data yang

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

dibutuhkan.<sup>30</sup> Sehingga penulis bisa langsung menanyakan semua hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik wawancara terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, teknik ini digunakan digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data jika telah memiliki gambaran tentang apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, informan diminta untuk mengemukakan pemikirannya.
- c. Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, dan hanya berpatokan pada garis besar permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Namun yang diwawancarai hanya 2 orang hakim yaitu Hj. Ardiani, S.H dan Erhamudin, S.H. sedangkan untuk 1 orang hakim lainnya yakni Joko Waluyo, S.H., S.P.Not.,M.M., tidak dapat diwawancarai dikarenakan ada kepentingan lain yang lebih mendesak.

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, website dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data yang terkait dengan penetapan hukuman kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Mojokerto.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* merupakan teknik memeriksa dan memilah data yang telah dikumpulkan selama penelitian terutama dari segi kelengkapan, serta kesesuaian antar data yang diperoleh serta relevansi data dengan penelitian.<sup>31</sup> Oleh karena itu penulis harus memeriksa kembali semua data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Mojokerto.

#### a. Pengelompokan Data (*classifying*)

Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data. *Classifying* adalah proses klasifikasi atau mengelompokkan data yang telah diperoleh dengan tujuan semua data yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>32</sup> dalam

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 243

<sup>32</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104

penelitian ini penulis mengklasifikasikan data dari Pengadilan Negeri Mojokerto serta mengklasifikasikan dari segi rumusan masalah.

b. Mengecek Keabsahan Data (*verifying*)

*Verifying* (verifikasi) merupakan proses memeriksa data dari lapangan untuk memastikan keakuratan data.<sup>33</sup> Maka penulis melakukan verifikasi data langsung kepada Pengadilan Negeri Mojokerto.

c. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis yaitu proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup>

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif.<sup>35</sup>

Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang dan permasalahan yang terjadi di masyarakat

---

<sup>33</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

<sup>34</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 48

<sup>35</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 1

mengenai sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Induktif yaitu metode berfikir dengan mengkaji data melalui proses yang berlangsung dari fakta.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* (kesimpulan) merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data penelitian. di dalam kesimpulan ini akan dipaparkan hasil penelitian.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. SEKILAS TENTANG PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO**

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto**

Pengadilan Negeri Mojokerto terbentuk sejak zaman hindia belanda dengan nama LANDRAAD bertempat sebelah timur alun-alun mojokerto berdekatan dengan kantor kabupaten dengan wilayah hukum meliputi kota kabupaten mojokerto juga kabupaten mojokerto.

Bertepatan pada tahun 1954 dilakukan pemisahan daerah kekuasaan hukum.

Tahun 1975 Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto secara resmi pindah dari Kantor lama ke Kantor baru di Jalan RA. Basuni Sooko Mojokerto sampai sekarang.

Tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB.

##### **2. Wilayah Hukum**

Cakupan daerah hukum pengadilan mojokerto terdiri atas :

- a. Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan.
- b. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 Kelurahan dan 299 Desa.

### **3. Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto**

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang.

### **4. Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto :**

- a. 1945-1946     R.S. SOERYOKOESOEMO
- b. 1946-1950     R. SOEGIOSO
- c. 1950-1959     R. TJANDROSO PRAWIRO S, SH
- d. 1959-1963     MR. INDROHARTO
- e. 1963-1968     ISMOE SOEMBOGO, SH
- f. 1968-1969     HABIB SARBINI, SH
- g. 1969-1976     R. WILARTO MARGOPRANOTO, SH
- h. 1976-1979     I GDE SOEDHARTA, SH
- i. 1979-1982     A. INDROJOEWONO, SH
- j. 1982-1986     SOEHARTO WONGSODIRJO, SH

- k. 1986-1987 HUMALA SIMANJUNTAK, SH
- l. 1987-1991 ALI AMRAN DAULAY, SH
- m. 1991-1993 LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH
- n. 1993-1995 SOEHARDJO, SH
- o. 1995-1997 AGUS AIR GULIGA DEWATA, SH
- p. 1997-1999 MARIJOTO, SH
- q. 1999-2002 MADE RAWA ARYAWAN, SH
- r. 2002-2005 HERMAN ALLOSITANDI, SH.,MH
- s. 2005-2008 SOEHARDJONO, SH.,MH
- t. 2008-2009 DR.SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM
- u. 2009-2011 JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH
- v. 2011-2014 SUTARTO, SH.,MHum
- w. 2014-2015 MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO
- x. 2015-2015 SIFA'UROSIDIN, SH.MH
- y. 2015-2016 WEDHAYATI, SH.MH
- z. 2016-2017 TAUFAN MANDALA, SH.MHum
- aa. 2017-2019 MUSLIM, SH

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto**

### **a. Tugas Pokok**

Tugas utama pengadilan negeri mojokerto ialah sebagai pelaksana peradilan tingkat pertama.

### **b. Fungsi**

Merupakan tingkat pertama untuk mencari keadilan dalam melakukan tugasnya.

#### c. Organisasi

Tugas yang diemban pengadilan negeri Mojokerto ialah :

Dalam pengadilan negeri Mojokerto terdapat kepaniteraan dipimpin oleh seorang panitera dan sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

##### 1) Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu:

- Menyusun kegiatan administrasi .
- Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
- Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana

- Penyusunan statistic perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
- Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 (Tiga) Kepaniteraan yaitu:

a) Kepaniteraan Perdata

bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata

b) Kepaniteraan Pidana

bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti

c) Kepaniteraan Hukum

Memiliki tugas menampung serta mengkaji data, menyusun laporan perkara balai harta peninggalan administrasi berkaitan dengan catatan sipil. Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda.

2) Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan

Tinggi Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- Melakukan urusan kepegawaian
- Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
- Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub yaitu:

- a) Bagian Kepegawaian dan Ortala: bertugas melakukan urusan kepegawaian.
- b) Bagian Umum dan Keuangan : memiliki tugas yang berhubungan dengan surat menyurat, juga keuangan.
- c) Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : bertugas untuk merancang anggaran, IT dan pelaporan.

Masing-masing Bagian-bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.

## **6. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto**

### **a. Visi Pengadilan Negeri Mojokerto**

"Mewujudkan Pengadilan Negeri Mojokerto Yang Agung"

### **b. Misi Pengadilan Negeri Mojokerto**

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Mojokerto

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mojokerto
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Mojokerto

## **B. Hukuman Kebiri Kimia Menurut Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto**

Semenjak disahkannya Undang-undang terkait pemberatan hukuman terhadap kasus kekerasan seksual yang berupa hukuman tambahan kebiri kimia untuk pertama kalinya, sebuah kasus pedofilia yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada tahun 2019 kemarin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Hakim yang memutus perkara kebiri kimia. Berdasarkan problematika mengenai kebiri kimia yang menjadi masalah yang masih belum selesai dibahas dan masih belum menemui titik terang. Banyak yang masih mempertanyakan mengapa hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tetap memutuskan untuk memberikan hukuman pidana kebiri kimia meskipun sudah jelas bahwasanya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menolak untuk menjadi eksekutor. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan pandangan hakim terhadap kasus kekerasan seksual yang makin tahun semakin meningkat. Salah satu

hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Hj. Ardiani, SH selaku salah satu anggota majelis hakim yang ikut dalam sidang perkara nomor 69/pid.sus/PN.Mjk terkait kasus pedofilia menyatakan :

“Jadi begini, majelis hakim ini tugasnya memeriksa perkara ini sampai dengan putusan selesai, sudah. Apabila putusan selesai eksekusinya jaksa. Sudah itu aja. Kita tidak memikirkan bagaimana nanti putusan ini bagaimana. Bagaimana nanti pelaksanaannya bagaimana. Yang melaksanakan putusan siapa? Jaksa. Naah seperti itu. Itu tadi, ada batasannya masing-masing. Majelis hakim tugasnya selesai ya pada saat putusan dibacakan, seperti itu. Jadi untuk nanti pendapatnya KOMNAS HAM seperti ini, pendapat IDI seperti ini, kita tidak ada kaitannya dengan itu. Dan putusan yang dibacakan itu, itu nanti akan dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Kan belum tentu putusan ini yang inkrah nanti, kan masih ada putusan banding, putusan kasasi, nah kalau dia misalkan kasasi kemudian putusan ini diubah oleh majelis Mahkamah Agung, kan kita gatau. Kan putusannya belum inkrah, jadi ini masih pemberitahuan banding. Kalau bandingnya putusannya, tadi putusan bandingnya menguatkan putusan pengadilan negeri”.<sup>36</sup>

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh bapak Erhamuddin S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang ikut memimpin sidang dalam sidang perkara nomor 69/pid.sus/PN.Mjk terkait kasus pedofilia menyatakan :

“Antara hakim dan petugas lainnya itu beda mbak. Harus mengetahui tugasnya masing-masing. Penyidik itu tuganya apa? Jaksa penuntut umum tugasnya apa? Hakim itu tugasnya apa? Masing-masing ada tugasnya masing-masing. Jadi gak bisa, ini nanti eksekusinya kita ikut-ikut, ya gak bisa. Terdakwa dan penuntut umum diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum, sampai dengan putusan ini inkrah. Nah kalau sudah inkrah selesai. Kalau sudah putusan akhir sudah selesai, seperti itu. Jadi terkait urusan setelah putusan nanti itu sudah bukan kewenangan kami.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Hj. Ardiani, SH, wawancara, (Mojokerto, 15 September 2020)

<sup>37</sup> Bapak Erhamuddin SH, wawancara, (Mojokerto, 15 September 2020)



Terkait dengan proses setelah putusan dijatuhkan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dijelaskan oleh ibu Hj. Ardiani, SH bahwasanya :

“Jadi terdakwa diperiksa, setelah selesai diperiksa di pengadilan negeri maka sesuai dengan undang-undang, terdakwa diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum. Pertama adalah banding, banding diajukan ke pengadilan tinggi, apabila sudah keluar putusan bandingnya, apabila dia tidak menerima putusan itu bisa mengajukan kasasi. Baik jaksa, maupun terdakwa. Jadi ada dua pihaknya ya, jadi ada jaksa dan terdakwa. Boleh mengajukan banding dua-duanya bu? Boleh. Salah satunya pun boleh. Menurut undang-undang diatur haknya”

Begitu pula yang dinyatakan oleh bapak Erhamuddin S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang ikut dalam memutuskan perkara pedofilia di PN Mojokerto :

“Setelah perkara diputuskan mbak, ada jeda waktu sebelum putusan dinyatakan inkrah. Nah, saat itu terdakwa dipersilahkan untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi. Begitu juga jika dalam putusan Pengadilan Tinggi pihak terdakwa merasa tidak puas dengan putusannya masih bisa mengajukan kasasi. Jadi untuk terdakwa sendiri masih bisa melakukan upaya hukum jika merasa putusan yang telah diputuskan oleh PN Mojokerto ini kurang adil. Karna kami hanya memutuskan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang”.

Jikalau dilihat dari tujuan pemidanaan yang mana tujuan ditetapkannya kebiri kimia sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Lalu apakah kebiri kimia ini sudah efektif untuk memberikan efek jera itu sendiri.

Hal ini dijawab oleh ibu Hj. Adriani SH bahwasanya :

“Kan sudah diatur dalam peraturan PERPPU ya. Ya itu tadi, karena kita menilai bahwa terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai predator seksual, maka akhirnya majelis sepakat untuk. “menimbang bahwa berdasarkan

fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap 9 orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok kemudian dijatuhi dengan pidana tambahan sesuai dengan PERPPU kepada terdakwa untuk menekan kecenderungan terdakwa untuk melakukan pidana yang berkaitan dengan pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana” kan tambah berat tadi, sebelumnya 8 ini 12. “juga menerapkan bentuk pencegahan atau preventif dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya terdakwa.”<sup>38</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Erhamuddin S.H terkait apakah kebiri kimia dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. Beliau menyatakan bahwasanya :

“Jadi sebelumnya ini terdakwa sudah diputus dengan perkara nomor 65/pidsus/2019. Jadi ada 2 perkara yang diajukan kepada terdakwa di pengadilan ini. Jadi untuk perkara 65 saya sendiri yang bikin. Jadi untuk perkara yang 65 ini pidananya sendiri 8 tahun kemudian dendanya 100 juta (kurungan 6 bulan), korbannya ini ada 1. Yang diajukan kesini ya, tapi kalau dari keterangan terdakwa sendiri korbannya lebih dari 1 umurnya seumuran dengan anak TPQ. Kemudian untuk perkara yang 69 ini terdakwa mengaku kalau dia melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap 9 orang anak. Nah dari situ, dari putusan 65 dan 69 akhirnya majelis sepakat selain pidana pokok, ini kan ada pidana pokoknya, jadi tidak boleh dipisahkan ya antara pidana pokok dan pidana tambahan. Kebiri kimia ini kan pidana tambahan. Jadi untuk perkara nomor 69 ini pidana pokoknya 12 tahun, jadi kita ya maksimal 20 tahun untuk perkara 65 dan 69. Jadi pas 20 tahun. Plus pidana tambahan kebiri kimia. Kalau untuk efek jeranya, kita hanya melakukan apa yang ada di dalam undang-undang. Jadi jikalau tujuan undang-undang adalah untuk memberikan efek jera, sekiranya semoga hal itu dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan”.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Hj. Ardiani, SH, wawancara, (Mojokerto, 15 September 2020)

<sup>39</sup> Bapak Erhamuddin, SH, wawancara, (Mojokerto, 15 September 2020)

Sementara mengapa pidana kebiri kimia yang dipilih oleh majelis hakim, bukan yang hukuman tambahan yang lainnya seperti pemasangan alat elektronik. Hal ini dijawab oleh ibu Hj. Ardiani SH bahwasanya :

“Ya itu tadi, sudah dipertimbangkan untuk mencegah, nah ini. “untuk menekan kecenderungan terdakwa untuk melakukan pidana yang berkaitan dengan pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak-anak”. Jadi kebiri kimia itu kan seperti, kayak apa itu ya, menekan hasrat seksualnya dengan cara suntikan seperti itu tadi. Untuk mengekang itu akhirnya majelis sepakat untuk memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia”.

Begitu pula bapak Erhamuddin S.H menyatakan bahwasanya :

“Terkait masalah itu, para hakim sepakat bahasanya kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak – anak sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa. Karena kan itu korbannya sudah banyak mbak. Dan kebiri kimia ini sendiri bisa dijadikan sebagai bentuk pencegahan agar di masa depan tidak sampai terulang lagi”.

Untuk perihal apa yang dilakukan tersangka selama masa banding, ibu Hj.

Adriani, SH menyatakan bahwasanya :

“Jadi ini kan dia ada di, apa itu namanya di rutan. Di rutan kelas 2 Mojokerto. Jadi begini, terdakwa ini di dalam KUHAP ada namanya penahanan. Penahanan tingkat penyidik, tingkat penuntut umum, pengadilan majelis pengadilan negeri, pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, kemudian penahanan nanti mahkamah agung. Jadi nanti masing-masing tahap ini ada penahanannya”.

Bapak Erhamuddin, SH juga menyatakan bahwasanya :

“Penahanan itu ada di beberapa tingkat pemeriksaan. Tingkat penyidikan, penyidikan itu polisi, mengambil berita acara penyidikan itu penyidik, kemudian penuntut umum, penuntut umum itu jaksa. Kemudian pengadilan tingkat pertama itu sini, pengadilan negeri. Kemudian banding pengadilan tinggi. Kemudian mahkamah agung kasasi itu mahkamah agung. Jadi pada tiap-tiap tahap itu masing-masing ada penahanannya. Jadi terdakwa bisa ditahan apabila dipasal 56 kalau tidak salah ada syaratnya objektif maupun subjektif. Dan diancam dengan ancaman pidananya lebih dari 9 tahun, itu bisa ditahan. Apabila terdakwa ancaman pidananya kurang dari 9 tahun bisa tidak ditahan. Seperti perkara 378 ini 4 tahun. 4 tahun itu bisa tidak ditahan. Seperti itu. Penahanan dilakukan dimana untuk terdakwa? Ya di rutan”.

Terkait pihak-pihak yang kayak membantu terdakwa dalam hal mengajukan untuk upaya banding dan kasasi itu, terdakwa diizinkan untuk menyewa pengacara. Untuk cara pengajuannya bu Hj. Adriani menyatakan bahwasanya:

“Bisa pengacaranya sendiri bisa terdakwanya sendiri. Kalau misalnya dia tidak punya pengacara atau penasehat hukum ya kalau di pidana, diajukan dirutan. Nanti dia ada namanya blanko gitu ditanda tangani dihadapan kalapas. Nanti orang rutan sana yang akan menghubungi pengadilan negeri, oh ini banding. Kecuali kalau ada penasehat hukumnya ya penasehat hukumnya yang kesini lewat PTSP sana bilang kalau terdakwa ini mengajukan banding atau mengajukan kasasi dan sebagainya. Karna perkara ini ancaman pidananya 20 tahun ya maka sejak awal terdakwa mulai dari penyidikan sampai dengan sekarang berada di dalam rutan”.

Bapak Erhammudin S.H juga menyatakan bahwasanya :

“Untuk terdakwa sendiri mbak, kalau dia mau melakukan upaya hukum terkait putusan kami. Dia bisa mnegajukan lewat pengacaranya, bisa juga dia sendiri yang mengajukan. Nanti pihak dari rutan yang akan konfirmasi kepada kami”

Terkait dengan keadaan korban dari tindak pidana pedofilia yang terjadi di

Mojokerto tersebut, ibu Hj Adriani memberitahukan bahwasanya :

“Kalau pada saat pemeriksaan saksi kemarin korbannya tidak datang, yang datang orang tuanya. Katanya sih terapi psikologi juga, trauma katanya kemarin. Dirumah gamau ketemu orang, gamau keluar rumah, akhirnya dia pindah rumah. Orang tuanya pindah rumah dari situ, perkara 69 kalau tidak salah. Kemudian si anak ini mengalami trauma”.

Bapak Erhammudin S.H ketika ditanya mengenai keadaan korban, beliau mengatakan bahwasanya :

“Saya kurang tau untuk keadaan korbannya mbak, setau saya ketika pemeriksaan kemarin hanya orang tuanya saja yang hadir. Untuk anaknya saya kurang paham bagaimana keadaannya.”

Sedangkan untuk para pelaku selama masa penahanan, ada yang mereka tidak ditahan. Dengan beberapa syarat yang sudah diatur dalam KUHAP. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Hj. Adriani, SH selaku hakim Pengadilan Negeri Mojokerto :

“Bisa ditahan bisa tidak, asalkan itu tadi. Memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Kalau memenuhi syarat keduanya ya ditahan, kalau tidak atau Cuma memenuhi salah satunya ya bisa ditahan dan bisa tidak ditahan. Dan penahanan itu apabila dia memenuhi syarat ternyata dia ditahan kemudian dia mengajukan penangguhan penahanan juga bisa. Syaratnya apa? Ada di dalam KUHAP”.

Sedangkan bapak Erhammudin S.H menyatakan bahwasanya :

“Untuk pelaku yang perkaranya sudah masuk, dia ditahan mbak. Tapi ada syarat subjektif dan obyektif yang harus dipenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi ya bisa ditahan dan bisa tidak. tergantung dari berapa banyak syarat yang terpenuhi dan tidak”.

### **C. Kebiri Kimia Menurut Maqashid Syariah**

Hukum islam menyentuh ke dalam semua aspek kehidupan manusia baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi agar dapat

terciptanya kebebasan, kesetaraan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu hal-hal seperti penyiksaan, perlakuan yang tidak baik, maupun penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi seperti hukuman kebiri terhadap manusia dalam agama islam sangatlah dilarang dan tidak diperbolehkan.

Jika dilihat dari tujuan diberlakukannya hukuman kebiri kimia ini terdapat dua tujuan yakni tujuan represif dan tujuan preventif. Tujuan represifnya adalah agar pelaku kejahatan seksual tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan tujuan yang bersifat preventif adalah agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan kejahatan seksual.

Jika terdapat bentuk hukuman lain yang dirasa dapat menunjang untuk tercapainya kedua tujuan tersebut, dengan dasar maqashid syariah maka dalam islam hal itu diperbolehkan. Bentuk hukuman lain tersebut alangkah lebih baik jika dilakukan tanpa harus melakukan penyiksaan terhadap pelaku, seperti hukuman penjara ataupun sanksi sosial dengan dikucilkan dari masyarakat. Bentuk hukuman lain seperti menanamkan rasa kasihan dalam diri pelaku juga dapat dilakukan. Hal itu dirasa dapat lebih efektif untuk dilakukan demi terciptanya kedua tujuan diatas dan lebih manusiawi sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia serta tidak dilarang dalam Islam.

Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga tidak terlepas dari urgensi maqasid syari'ah. Di dalam hukum islam,

Jasser Auda menjelaskan bahwasanya maqashid mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.<sup>40</sup>

Maqashid diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu daruriat, hajiat, dan tahsiniat. Daruriat merupakan hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia dan menjadi tujuan dibuatnya hukum. Adapun hajiat hal hal yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir tahsiniyah, tujuannya memperindah hal-hal yang berada pada tingkatan sebelumnya.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak pada psikis anak, keturunan dan lingkungan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, maka perlu adanya penjagaan dan perlindungan kepada anak. Dalam ajaran agama islam kekerasan seksual semacam ini sangat dilarang oleh agama. Sanksi kebiri yang diterapkan pemerintah tentu saja untuk menjaga dan melindungi anak dari kejahatan seksual.

Jika dilihat dalam maqashid syariah, sanksi kebiri kimia sendiri selain bertujuan untuk menjaga agama, juga bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap keturunan, hal ini sesuai dengan yang menjadi tujuan dibuatnya hukum Islam. Al-‘Āmiri mengungkapkan hal tersebut

---

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pen. Rosidin dan ‘Alī ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, Cet. 1, 2015), 31-32.

dengan istilah ‘hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan’. Al-Juwaini mengembangkan istilah tersebut menjadi ‘Teori Penjagaan’ yang di dalamnya mengandung makna ‘Menjaga Kemaluan’.<sup>41</sup>

Dalam hukum positif, pelaku kekerasan seksual pada anak atau pedofilia dapat dijatuhi hukuman kebiri, yakni kebiri kimia. Namun, dalam hukum pidana islam, pelaku pedofilia diberikan sanksi seperti pelaku zina atau mendekati zina yakni rajam atau cambuk, serta hukuman mati jika pelaku melakukan *liwath* / sodomi. Adapun sanksi kebiri kimia dalam hukum pidana Islam tidak ada atau tidak diterapkan.

Meskipun pada zaman kuno sebenarnya kebiri telah dilakukan, seperti tradisi kasim istana di Tiongkok kuno, namun kebiri ini tidak diperbolehkan oleh Al-Qur’an dan Hadis. Imam Shanani dalam kitabnya *Subulus salam*, serta ulama-ulama fiqih lainnya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Maturidi dalam *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta’alliqah bi Al Syahwat* menyebutkan haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak para ulama. Selain ulama klasik, para ulama kontemporer pun kontra terhadap kebiri, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, dan lain-lain. Mereka berdalih bahwasanya pengebirian berarti mengubah fisik manusia dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep jinayah Islamiyah.<sup>68</sup>

---

<sup>41</sup> Justicia Islamica, Vol. 14 No. 2 Tahun, 2017 171



Jika pengebirian fisik tidak dianjurkan dalam hukum pidana islam, lalu bagaimana dengan kebiri kimia untuk para pelaku pedofilia dan dalam keadaan darurat kejahatan seksual pada anak? kebiri dengan suntikan kimiawi berdampak akan perubahan hormon estrogen. Akibatnya, laki- laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Syariat Islam jelas melarang laki-laki menyerupai perempuan. Jika laki-laki yang menyerupai perempuan diharamkan, maka wasilah yang menjadi keharaman ini terlaksana juga diharamkan.

Oleh sebab itu, penulis menarik kesimpulan bahwasanya jika merujuk kepada literatur klasik dari ulama-ulama terdahulu, kebiri kimia tidak dianjurkan dalam hukum pidana Islam dan jika dilaksanakan maka bertentangan dengan kaidan fiqih dan norma-norma yang ada. Akan tetapi, pelaksanaan kebiri kimia pun didukung oleh sebagian ulama kontemporer, seperti dari sebagian ulama NU, dan kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pedofil ini dikenakan hukuman ta'zīr, yaitu jenis hukuman yang belum terdapat ketentuan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Para ulama sepakat terkait kejahatan yang belum diatur, hakim dapat berijtihad dengan kaidah

fiqih *Addharuratu tubihu al mahdhurat* (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).

Berbeda dengan zina, walaupun berkaitan dengan kejahatan seksual yang hukumannya sudah ditentukan dalam nash, kejahatan seksual terhadap anak yang objeknya adalah anak-anak yang belum memiliki kemampuan menentukan perbuatan baik dan buruk, dibawah asuhan orang tua atau wali. Dalam zina karena adanya saling rida dan keinginan yang sama dengan antara pelaku dan korban, yaitu seorang laki-laki terhadap wanita yang bukan istrinya yang dilakukan dengan sengaja.<sup>42</sup>

Memperhatikan pemaparan teoritis hukum pidana tentang sanksi kebiri kima bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dilandasi dengan kemaslahatan atau *maqasid* syariah, begitu juga dalam perkembangan teori-teori hukum pidana Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan landasan dalam hukum Islam tersebut dengan memberikan wewenang kepada Ulul Amri (penguasa) untuk memberikan sanksi kebiri kimia tersebut.<sup>43</sup>

Dalam *maqashid* syariah terdapat 5 hal yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan sebuah hukum, yakni Hifdz an-nafs (Menjaga

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 35

<sup>43</sup> Justicia Islamica, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) Vol. 14 No. 2, 172

diri/jiwa), Hifdz al-maal (menjaga harta), Hifdz al-aql (menjaga akal), Hifdz ad-diin (menjaga agama), dan Hifdz an-nasl (menjaga keturunan).

Hifdz an-nafs : Menjaga Jiwa, kebiri kimia sebagai sanksi yang diperuntukkan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bertujuan untuk melindungi baik si pelaku maupun si anak. Demi untuk mencegah si pelaku melakukan kejahatan serta menjaga anak agar tidak menjadi korban kejahatan seksual. Meskipun demikian, hal ini tetap harus dibantu dengan pengawasan baik dari orang tua maupun dari masyarakat demi terciptanya keamanan bersama.

Hifdz al-mal : Menjaga Harta, sanksi kebiri kimia ini juga bertujuan untuk menjaga harta, maksud harta disini adalah anak anak yang menjadi harta paling berharga bagi orang tuanya, jikalau samapai anak menagalami pelecehaan seksual baik dari segi fisik maupun psikis maka orang tua akan mengerahkan segenap tenaga dan hartanya untuk dapat memberikan pengobatan terbaik untuk anaknya.

Hifdz al-aql : Menjaga Akal, menjaga akal disini adalah dengan memberikan zat kimia yang dapat menekan hormone testosterone di dalam diri pelaku, maka hasrat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual yang dipengaruhi oleh naiknya libido akan dapat ditekan, dan pelaku akan dapat lebih mengendalikan diri dan berfikir bahwasanya

hal-hal yang telah dilakukannya yang berkaitan dengan kejahatan seksual adalah salah.

Hifdz ad-din : Menjaga Agama, sanksi kebiri kimia sendiri juga memiliki tujuan untuk menjaga agama, yakni mencegah pelaku melakukan kejahatan asusila, mencegah terjadinya perzinahan antara kedua belah pihak, dan mencegah terjadinya hal-hal lain yang dilarang oleh agama.

Hifdz an-nasl : Menjaga Keturunan. Selain 4 hal diatas, sanksi kebiri kimia juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Menjaga anak dari kehamilan diri akibat dari kejahatan seksual yang telah dialaminya. Karna selain mendapat trauma fisik, korban juga pastinya mendapatkan trauma psikis, lebih parahnya lagi jikalau korban sampai hamil, hal itu akan sangat menjadi beban bagi keluarga korban. Oleh karena itu sanksi kebiri kimia ini diharapkan dapat mencegah terjadinya hal hal tersebut, serta menjaga kesucian keturunan yang dihasilkan dari sebuah pernikahan.

Jadi disini penulis menyimpulkan bahwasanya sanksi kebiri kimia jika ditinjau dari maqashid syariah adalah diperbolehkan, karena berdasarkan hukum islam yang memberikan wewenang terhadap Ulul Amri (penguasa) untuk menetapkan sanksi kebiri kimia tersebut. sanksi tersebut diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dengan

menekan hormone keelakian yang ada pada diri pelaku. Hal ini jelas untuk mencapai kemasalahata bersama. namun berbeda dengan hukum pidana islam yang menentang sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena menurutnya dalam hukum islam hukuman kebiri itu dilarang, dan kejahatan seksual yang telah dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan zina, yang hukumannya adalah rajam bagi yang sudah menikah, dan dikucilkan bagi yang belum menikah. Namun jika dilihat ebih jelas lagi, kejahatan seksual disini lebih condong kedalam perbuatan pemerkosaan. Karena antara pelaku dan korban ada unsur pemaksaan, jadi jikalau dikategorikan sebagai perbuatan zina yang dimana dilakukan dengan unsur suka sama suka adalah jelas berbeda. Oleh karena itu, sanksi kebiri kimia ini menurut maqashid syariah adalah diperbolehkan karena mengandung unsur kemanfaatan baik bagi korban, pelaku, dan msyarakat sesuai dengan apa yang ada telah dijelaskan di dalam undang-undang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Menurut hakim pengadilan negeri Mojokerto bahwasanya mereka menetapkan putusan atas dasar mengacu pada undang-undang yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan bagaimana putusan itu dilaksanakan, sudah bukan kuasa hakim. Itu sudah menjadi kuasa jaksa penuntut umum. Hakim hanya memutus perkara sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.

Jika dilihat dari segi maqashid syariah, sanksi kebiri kimia merupakan hukuman yang tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan kejahatan seksual disamakan dengan zina yang hukumannya adalah rajam. Namun berdasarkan maqashid syariah yang melihat kepada aspek Hifdz an-nafs (Menjaga diri/jiwa), Hifdz al-maal (menjaga harta), Hifdz al-aql (menjaga akal), Hifdz ad-diin (menjaga agama), dan Hifdz an-nasl (menjaga keturunan) yang menyebutkan bahwasanya di dalam sanksi kebiri kimia terdapat manfaat untuk kemaslahatan bersama. Serta yang mana hakim merujuk pada kaidah fiqh *Addharuratu tubihu al mahdhurat* (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang),

dikarenakan kejahatan seksual yang terus menerus mengalami peningkatan dan dapat membahayakan keselamatan anak-anak sebagai generasi bangsa, maka sanksi kebiri kimia diperbolehkan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya belum ada kejelasan mengenai pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku, karena terdakwa sendiri masih mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Untuk hakim, dalam memutuskan perkara sudah baik. Seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/PN.Mjk/2019 karena selain dalam memutuskan perkara sudah mengacu seperti yang tercantum dalam Undang-undang, juga memperhatikan terhadap apa yang telah dialami oleh korban.

Saran untuk pihak-pihak yang menentang terhadap diberlakukannya hukuman kebiri kimia, diharapkan agar tidak hanya berfokus terhadap pelaku saja, namun juga memperhatikan terhadap nasib si korban. Karena hukuman kebiri kimia ini sendiri masih dapat pulih nantinya ketika suntikan sudah tidak diberikan, namun korban seumur hidupnya tetap akan mengalami trauma baik fisik maupun psikologis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: Refika Aditama, 2003

Muchsin *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM, 2004

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 2008

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad

Fachur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1984

Fathi al-Daraini, *al-Man-Kitab al-Hadis*, 1975

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997

### KUHP

Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill, 1997

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang; UIN Press, 2012

Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta: Mitra Wacana, 2000



Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press

Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pen. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, Cet. 1, 2015

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*

## JURNAL

Supriyadi Widodo Eddyono, *Ancaman Over Kriminalisasi dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005*

*Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2016 Vol 13, No 2

Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Justicia Islamica, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017, Vol. 14 No. 2

## SKRIPSI

Ary Prasetyo Handoko, *"Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Omor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)"*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 2019

Hadyan Harits, “*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016

Madnur, “*Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak*’, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002

#### WEBSITE

<https://beritagar.id/artikel/sains-teknoo>

<https://setneg.go.id>

<https://www.jawapos.com/opini/31/08/2019/problem-fikih-kebiri-kimia/>

[www.mtribunnes.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto](http://www.mtribunnes.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto)

<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.dilakukan.dalam.perspektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya>

<http://www.muslimdaily.net/artikel/Islam-tak-pernah-syariatkan-kebiri-bagi-pedofil.html>

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

<http://etheses.uin-malang.ac.id>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asas\\_legalitas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas)

#### WAWANCARA

Hj. Ardiani, SH, Mojokerto, 15 September 2020

Bapak Erhamuddin SH, Mojokerto, 15 September 2020

## LAMPIRAN





**Pedoman Wawancara**

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tetap memutuskan untuk memberikan hukuman pidana kebiri kimia meskipun sudah jelas bahwasanya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menolak untuk menjadi eksekutor.
2. Bagaimana proses yang dijalankan setelah putusan hukuman tambahan kebiri kimia dijatuhkan terhadap pelaku?
3. Apakah kebiri kimia ini sudah efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak?
4. Mengapa pidana kebiri kimia yang dipilih oleh majelis hakim, bukan yang hukuman tambahan yang lainnya ?
5. Apa yang dilakukan terhadap pelaku selama masa banding?
6. Bagaimana dengan keadaan korban dari tindak pidana pedofilia yang terjadi di Mojokerto tersebut?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap	: Lailatul Mufaidah
Tempat & Tanggal Lahir	: Mojokerto, 5 Juni 1998
NIM	: 16210038
Tahun Masuk UIN	: 2016
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah	: Ds. Sambiroto RT.02/RW.02, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
Alamat di Malang	: Jalan Mertojoyo Blok L No. 8b Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang
Nomor HP	: 081246826400
E-mail	: <a href="mailto:lailatul.mufaidah@gmail.com">lailatul.mufaidah@gmail.com</a>

### Pendidikan Formal

2002-2008	: MI Walisongo 1 Mojokerto
2008-2011	: SMP Unggulan Darul Ulum 1 Jombang
2011-2015	: MA Unggulan Darul Ulum STEP-2 IDB Jombang
2016-2020	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang